

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN (Studi Program Buy The Service Trans Metro Pasundan Bandung)

Sa'arah Salsabila¹

Budi Kurniadi²

^{1,2)} Prodi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana

Email: saarsal13@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya implementasi kebijakan Penyelenggaraan Perhubungan Buy The Service di Kota Bandung. Berdasarkan latar belakang peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi kebijakan Penyelenggaraan Perhubungan Buy The Service di Kota Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III Dalam Sugiyono (2011) yang meliputi empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perhubungan Buy The Service di Kota Bandung akan berjalan maksimal apabila melaksanakan indikator yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh melalui: Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Penyelenggaraan Perhubungan Buy The Service di Kota Bandung belum berjalan optimal karena belum secara optimal melaksanakan dimensi Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, transportasi publik, Trans Metro

ABSTRACT

This research is motivated by the implementation of Buy The Service public transportation policy in Bandung based on the background of researchers identifies the problem as follows how the implementation of Buy The Service public transportation services in Bandung City theory used in this study is the theory of policy implementation from Edward III in Sugiyono (2011) which include four dimensions, namely communication, resources, dispositions, bureaucratic structures on the theory approach, researchers formulate propositions of the implementation of public transportation service policies Buy The Service in Bandung City will run optimally when carrying out indicators that include communication, resources, dispositions, and bureaucratic structures. The method used using qualitative methods with descriptive while data collection techniques are obtained through interview observations, documentation based on the result of the study shows that the implementation of public transportation service policies in the city of Bandung has not been running optimally because it has not been optimally implementing dimensions communication, resources, dispositions and bureaucratic structures.

Keywords : policy implementation, public transportation, Trans Metro

PENDAHULUAN

Kegiatan Penyelenggaraan perhubungan sejak lama telah disadari oleh masyarakat merupakan bagian penting dalam proses infrastruktur setiap daerah, baik daerah perkotaan ataupun pedesaan, dan juga untuk negara maju ataupun negara bukan Penyelenggaraan Perhubungan memiliki fungsi menyelenggarakan transportasi yang mana didalamnya termasuk pelayanan angkutan. Pelayanan angkutan sendiri merupakan kegiatan memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lainnya hingga dapat mencapai tujuan atau manfaat yang diperlukan.

Tingginya jumlah kendaraan pribadi tersebut pada akhirnya menjadi penyebab masalah nomor satu di Kota Bandung yaitu Kemacetan. Penggunaan kendaraan pribadi yang cukup tinggi di Kota Bandung sendiri diduga disebabkan oleh ketidaknyamanan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum. Akibatnya, tuntutan sarana transportasi terhadap Pemerintah yang semakin berkembang harus cepat, murah, aman dan nyaman. Berdasarkan tuntutan tersebut pada Tahun 2020 Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuat program Buy The Service yang mana program ini merupakan skema pembelian layanan dari pemerintahan pusat untuk perkotaan.

Dalam melaksanakan implementasi kebijakan Program Buy The Service ini

pemberian layanan angkutan umum ini mengikuti peraturan atau SOP yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Pasal 33 ayat (1) “Pemerintah Daerah menetapkan standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, meliputi:

- a) keamanan;
- b) keselamatan;
- c) kenyamanan;
- d) keterjangkauan
- e) kesetaraan; dan
- f) keteraturan.

Dari permasalahan tersebut peneliti berasumsi sementara bahwa masalah belum optimalnya implementasi program Buy The Service di Kota Bandung diantaranya:

1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai teknis pembayaran melalui digital program Buy The Service dan mengenai pemberhentian trayek yang masih belum merata.
2. Anggaran pemerintah yang masih belum cukup untuk penyediaan infrastruktur transportasi publik seperti halte bus dan jalur khusus dan masih kurangnya pemahaman SDM dalam melaksanakan implementasi.
3. Standar Pelayanan Minimum angkutan perkotaan yang belum terpenuhi sehingga menyebabkan ketidak

nyamanan penumpang. Seperti kurangnya fasilitas keamanan dan kenyamanan.

4. Koordinasi antara Pemerintah dengan pihak angkutan umum lainnya masih belum maksimal dilihat dari beberapa konflik dengan angkutan umum khususnya angkot

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (1978 :447), dalam (Wahab 2018) ("Implementasi kebijakan" mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh individu atau organisasi publik atau swasta untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan). Nugroho (2009,494–495) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai proses pelaksanaan suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya. Sama sekali tidak lebih atau tidak perlu. Pembentukan kebijakan turunan atau turunan dari kebijakan publik tersebut merupakan pilihan lain untuk mewujudkannya, bersamaan dengan implementasi langsung dalam bentuk program. Berikut ini adalah gambaran luasnya. Secara garis besar implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses pembuatan kebijakan yang mengikuti pengesahan suatu peraturan perundangundangan.

Istilah "implementasi" digunakan dalam arti luas untuk menggambarkan proses

melaksanakan kebijakan atau program untuk mencapai tujuan yang dinyatakan melalui penggunaan berbagai aktor, organisasi, proses, dan metode. Sebaliknya, implementasi adalah fenomena multifaset yang dapat dianggap sebagai proses, hasil, atau pengaruh.

Penyelenggaraan Perhubungan

Pengaturan penyelenggara perhubungan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3 Penyelenggaraan perhubungan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan transportasi darat, laut dan udara yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat;

mewujudkan etika penyelenggaraan perhubungan darat, laut dan udara; dan mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Penyelenggaraan perhubungan di Daerah merupakan penyalur kebijakan pembangunan transportasi di Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat dan dokumen perencanaan Daerah dalam kerangka Sistem Transportasi Nasional (Sistranas).

Program Buy The Service

Pembelian Jasa Angkutan Perkotaan (selanjutnya disebut Buy The Service) adalah skema pemberian subsidi berupa pembelian jasa dari perusahaan angkutan umum untuk penyediaan angkutan penumpang umum di perkotaan, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 9 Tahun 2020 Tentang Subsidi Angkutan Umum Penumpang Perkotaan. Pembinaan sistem transportasi publik di kota-kota besar termasuk implementasi Buy The Service. Sistem ini menggantikan sistem transportasi perkotaan berbasis deposit sebelumnya di sejumlah kota besar.

Program Buy The Service ini yang merupakan program dari Kementerian Perhubungan melalui Direktur Jendral (Ditjen) Perhubungan Darat atau lebih dikenal juga dengan sebutan “Teman Bus atau Bis Kita di Jabodetabek” yang merupakan layanan jasa angkutan massal perkotaan berupa bus yang memperkuat konektivitas moda transportasi. Mekanisme program ini dilakukan dengan pembelian layanan kepada pihak ke-3 artinya Kementerian Perhubungan bukan membeli bus langsung lagi untuk angkutan massal bus perkotaan tersebut melainkan dengan pembelian layanan. Ataupun bisa dikatakan bahwa Skema Buy The Service (Pembelian Layanan) untuk angkutan massal perkotaan dilakukan dengan

membeli layanan angkutan massal perkotaan kepada operator dengan mekanisme lelang berbasis standar pelayanan minimal atau quality licensing.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana peneliti ingin menggambarkan dan mendeskripsikan realitas serta memperoleh pemahaman secara menyeluruh. Selain itu dengan metode ini peneliti terjun langsung ke lapangan sehingga mampu mendapatkan data yang objektif mengenai Implementasi Program Buy The Service di Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Dalam penelitian ini dilakukan observasi secara langsung kepada beberapa bus Trans Metro Pasundan. Dan juga dalam pengumpulan data peneliti juga melakukan wawancara mendalam yang mana peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam implementasi program Buy The Service di Kota Bandung. Wawancara in deep interview atau wawancara mendalam dalam Moleong (2005) merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan

Perhubungan Studi Kasus Program Buy The Service di Kota Bandung, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Pasal 33 Ayat 1, peneliti mencoba untuk menganalisa secara empirik dengan mengaplikasikan prinsip – prinsip Implementasi Kebijakan. Dalam proses kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III, implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasi yang dilakukan oleh pemerintahan maupun PT (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan dengan faktor-faktor sebagai berikut:

Faktor Komunikasi dengan parameter informasi dan sosialisasi ini berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, peneliti berasumsi kejelasan informasi aturan kebijakan penyelenggaraan perhubungan Buy The Service ini sudah disampaikan cukup jelas kepada masyarakat melalui berbagai media. Sosialisasi dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perhubungan program Buy The Service belum terealisasi dengan baik dikarenakan sosialisasi yang belum merata diberbagai kalangan, masih ada yang belum mengetahui secara jelas sistem

pembayaran dan trayek Trans Metro Pasundan.

Faktor Sumber Daya, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan menyimpulkan bahwa sumber daya manusia yang terdapat pada program Buy The Service di Kota Bandung masih membutuhkan pelatihan , dan anggaran yang tersedia dalam program Buy The Service ini masih belum mampu mencukupi kebutuhan sarana prasarana yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur

Faktor Disposisi, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan sikap pelaksana dalam program Buy The Service ini sudah dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang diberikan begitupun sudah sesuai dengan tupoksinya namun masih belum maksimal karena masih banyak ditemukan pelanggaran baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan oleh staff pelaksana. Pelayanan yang belum maksimal dalam pemberian pemahaman kepada masyarakat, sehingga menyebabkan masyarakat kurang puas atas pelayanan tersebut.

Faktor Struktur Birokrasi, pada program Buy The Service Trans Metro Pasundan ini pembagian tugas antara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Setempat dan Operator pelaksana Perum Damri dan PT Bluebird sudah berjalan dengan baik. Namun, masih diperlukan

koordinasi dengan pihak angkutan umum lainnya untuk menghindari konflik yang menyebabkan ketidaknyamanan penumpang.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa faktor penghambat antara lain: sosialisasi yang belum merata ke berbagai kalangan. Kurangnya dukungan anggaran dan keterbatasan staff pelaksana dalam memberikan pelayanan. Pelaksanaan koordinasi yang belum menyeluruh.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh khususnya Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan implementasi. Pemerintah melakukan sosialisasi yang lebih beragam tidak hanya menggunakan media sosial sajamelainkan on the spot ke beberapa tempat strategis. Selain itu juga Pemerintah akan mencukupi fasilitas yang belum ada dan akan memberikan pelatihan rutin kepada staff.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti mengambil simpulan bahwa kebijakan Penyelenggaraan Perhubungan Program Buy The Service Trans Metro Pasundan merupakan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang transportasi Kementerian Perhubungan yang mewujudkan Penyelenggaraan Perhubungan yang prima dengan meliputi keamanan, keselamatan,

kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan. Namun, dalam pelaksanaannya implementasi kebijakan penyelenggaraan perhubungan program Buy The Service Trans Metro Pasundan di KotaBandung ini masih belum jalan dengan maksimal sesuai yang diharapkan, hal ini dikarenakan di lapangan pelaksana kebijakan dihadapkan dengan berbagai hambatan sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan ini belum optimal. Dilihat dari beberapa faktor yang belum optimal mulai dari fakto komunikasi, sumber daya, disposisi dan strktur birokrasi. Hasil penelitian juga menemukan temuan lain selain dari faktor tersebut diperlukan juga kekuasaan , strategi dari aktor-aktor yang terlibat agar implementasi kebijakan penyelenggaraan perhubungan program Buy The Service Trans Metro Pasundan dapat berjalan lebih optimal.

PUSTAKA

Nugroho, Dr. Riant. (2009) Public Policy. Jakarta: PT Gramedia
Subarsono 2015:101 Nugroho, R., 2009. Public policy (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Elexx Media Komputindo
Wahab, Solichin (1997), Analisis Kebijakan dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : PT Bumi Aksara
Solichin, A. W. (2008). Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi

-
Negara. Jakarta : Bumi Aksara

A. Dokumen dan Sumber Lainnya

Permenhub No. PM 9 Tahun 2020 Tentang

Pemberian Subsidi Angkutan

Penumpang Umum Perkotaan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik

Indonesia No. PM 44 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 46 Tentang

Standar Pelayanan Minimal Angkutan

Orang

Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Dalam Trayek

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.

3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara

Perhubungan

Peraturan Daerah No. 16

Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan

Perhubungan